



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD ARIEF BARATA**
2. Jabatan : **KEPALA KPPN BENGKULU**
3. NHK : **473516**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.420.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 9.500 m2/42 m2 di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 742 m2/140 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 596.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, MITSHUBISI XPANDER SPORT MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOBIL, ISUZU ELF Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 598.615.815**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	392.328.531
F. HARTA LAINNYA	Rp.	136.700.000
Sub Total	Rp.	4.144.144.346
III. HUTANG	Rp.	37.085.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.107.059.346

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.